

INNOVATION OF INTEGRATED PERSONNEL INFORMATION MANAGEMENT APPLICATION SYSTEM (E-Pinisi) IN BAPPELITBANGDA, SOUTH SULAWESI PROVINCE

Aslinda¹, Nurhalifah², Andi Cudai Nur^{3*}

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

*e-mail Correspondence : andicudainur@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the Innovation of the Integrated Personnel Information Management Application System (E-Pinisi) in BAPPELITBANGDA, South Sulawesi Province. This research includes descriptive qualitative research with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation and conclusions.

The results showed that the Innovation of the Integrated Personnel Information Management Application System (E-Pinisi) in BAPPELITBANGDA South Sulawesi Province has provided innovation in realizing Good Governance, this is evidenced by Roger's (2003) innovation characteristic indicators, namely: 1) Relative Advantage, 2) Compatibility, 3) Complexity, 4) Triability, 5) Observability. that in general, the innovation of the integrated personnel information management application system (E-Pinisi) in BAPPELITBANGDA South Sulawesi Province is good, but it needs to be optimized on the Complexity indicator.

Keywords: Innovation, Application, Personnel Administration, and E-Pinisi

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah di Indonesia saat ini adalah proses administrasi kepegawaian, proses penginputan data kepegwaiannya masih dilakukan secara manual sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) kurang optimal dalam melakukan proses administrasi kepegawaian yang memerlukan banyak waktu dalam pengelolaan informasi kepegawaian. Hal ini menghambat terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*).

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* yaitu dengan penerapan teknologi dan informasi pada bidang pemerintahan disebut dengan pemerintahan elektronik (*E-Government*) yang mengacuh pada prinsip *Good Governance*. *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. *E-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik,

atau proses pemerintahan yang demokratis. Salah satu instansi pemerintah yang menerapkan *E-Government* yaitu BAPPELITBANGDA di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, Penerapan *E-Government* pada BAPPELITBANGDA dapat memberikan informasi dan memudahkan pelayanan bagi ASN.

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* berfungsi sebagai salah satu proses pemerintahan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan kepegawaian, tentunya dibutuhkan adanya kebijakan serta strategi dari pengembangan *E-Government* tersebut. Salah satu dari pemanfaatan sumber teknologi yang berbasis komputer tersebut dengan terbentuknya sebuah sistem yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi (BKD) sendiri yaitu sistem informasi manajemen kepegawaian yang handal dengan harapan terwujudnya data ASN yang akurat melalui sistem aplikasi pengelolaan informasi kepegawaian terintegrasi (E-Pinisi) secara Online.

E-Pinisi dikoordinasi oleh BKD Pemerintah Sulawesi Selatan yang merupakan sebuah aplikasi layanan informasi yang terintegrasi dengan seluruh proses kepegawaian yang dikembangkan oleh BKD Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, munculnya Sistem Aplikasi E-Pinisi sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah pada Administrasi kepegawaian Pemerintah Provinsi yang hanya digunakan pada Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Pemanfaatan E-Pinisi juga dilaksanakan oleh BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai suatu aplikasi manajemen kepegawaian yang secara khusus dirancang sesuai kondisi nyata manajemen ASN di lingkungan pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* pada BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan. Agar manajemen pegawai menjadi optimal, maka E-Pinisi dibangun untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat saat ini. Terbangunnya sistem informasi ini, diharapkan pengambilan keputusan manajerial tentang kepegawaian di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berjalan dengan cepat, juga pelayanan administrasi kepegawaian dilaksanakan secara online sehingga mencapai proses yang cepat, mudah dan akurat. Adapun data pegawai yang menggunakan aplikasi E-pinisi tiga bulan terakhir di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pengguna Aplikasi E-Pinisi

Golongan Pegawai	Jumlah Pengguna E-Pinisi		
	Juli	Agustus	September
Golongan IV	65	64	64
Golongan III	101	101	100
Golongan II	20	20	20

Golongan I	3	3	3
Jumlah	189	188	187

Sumber Data: BAPPELITBANGDA,2022

Berdasarkan tabel 1 tentang jumlah pengguna aplikasi E-Pinisi menunjukkan bahwa pengguna aplikasi E-Pinisi dalam tiga bulan terakhir selalu menurun hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya pegawai yang meninggal dunia, pegawai yang *resign*. Jumlah pegawai yang menggunakan E-Pinisi pada bulan Juli sebanyak 189 orang, bulan Agustus sebanyak 188 orang, dan bulan September sebanyak 187 orang.

Aplikasi ini mulai diterapkan di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, dan berjalan sampai saat ini. Namun, Pengoperasian E-Pinisi hingga saat ini belum berfungsi secara maksimal, ini disebabkan karena sejumlah Pegawai di BAPPELITBANGDA mengaku belum paham dalam mengoperasikan dan tidak mengetahui fungsi aplikasi itu dengan baik, dengan kata lain bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada pegawai di BAPPELITBANGDA masih tergolong kurang baik.

Melihat bahwa *E-Government* sebagai salah satu proses pemerintahan dalam mewujudkan *Good Governance* sehingga banyak yang melakukan penelitian terkait hal tersebut. Berikut beberapa penelitian terdahulu, Pertama yang dilakukan oleh Nindry Septya Pranita pada tahun 2015 dengan judul penelitian Inovasi Administrasi Kepegawaian Dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu). Hasil penelitian Nindry Septya Pranita menunjukkan bahwa BKD Kota Batu telah melaksanakan peraturan pemerintah tentang pengembangan electronic government dengan mengembangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian di lingkungan pemerintahan Kota Batu. Sistem pelayanan ini dapat mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian, agar pelayanan kepegawaian menjadi prima dan cepat.

Penelitian ke dua oleh Muhammad Fahmi Azhari & Manar pada tahun 2022 dengan judul Penggunaan Aplikasi SI D'nOK oleh Pemerintah Kota Semarang Dalam Mewujudkan *Good Governance*. Hasil Penelitian Muhammad Fahmi Azhari menunjukkan bahwa dalam penggunaan aplikasi SI D'nOK belum mewujudkan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*. Hal ini dibuktikan dengan buruknya keberjalanan aplikasi ketika masyarakat menggunakannya. Pemerintah Kota Semarang berpendapat bahwa penggunaan aplikasi ini telah mewujudkan prinsip-prinsip good governance yang ada. Akan tetapi jika dikaitkan dengan temuan di lapangan dan ulasan masyarakat di *Google Play Store*, pendapat pemerintah tersebut tidak sesuai. Hal ini terjadi karena buruknya keberjalanan aplikasi ini. Buruknya penggunaan aplikasi ini juga membuktikan hukum yang tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Masyarakat juga mengalami kesulitan ketika hendak memperoleh informasi pengajuan pelayanan yang mereka ajukan. Sehingga dari temuan permasalahan di atas membuktikan bahwa penggunaan aplikasi ini belum mewujudkan *Good Governance* dengan maksimal.

Berdasarkan hal tersebut peneliti juga tertarik untuk meneliti topik yang sama dengan beberapa perbedaan tertentu. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada teori yang digunakan serta lokus dan fokusnya. Maka akan dilakukan penelitian yang berjudul **“Inovasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Informasi Kepegawaian Terintegrasi (E-Pinisi) di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan.”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Inovasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Informasi Kepegawaian Terintegrasi (E-Pinisi) Di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan”?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu “Untuk Mengetahui Inovasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Informasi Kepegawaian Terintegrasi (E-Pinisi) di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan”.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah dalam kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai Inovasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Informasi Kepegawaian Terintegrasi (E-Pinisi) di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi sumber informasi kepada pegawai kantor BAPPELITBANGDA untuk mewujudkan *Good Governance* melalui E-Pinisi.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Inovasi

Konsep inovasi berasal dari kata *innovate* yang artinya membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Poejadi (2001) menyatakan inovasi diartikan sebagai penemuan atau *invention* yang bermakna temuan sebenarnya yang telah ada sebelumnya. Sementara kata *invention* yang bermakna sama dengan inovasi diartikan sebagai penemuan yang benar-benar baru sebagai hasil temuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2020) inovasi berarti pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaharuan, penemuan baru, yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Inovasi merupakan konsep yang relatif baru dalam literatur administrasi publik (*public administration*). Hasil penelitian Mars dalam Asropi (2008) mengungkapkan bahwa sampai tahun 1966 tidak ditemukan publikasi dari tulisan administrasi Administrative Reform publik yang mengulastentang inovasi. Adapun literatur klasik yang memuat konsep inovasi dalam konteks reformasi antara lain adalah artikel “*Innovation in Bureaucratic Institutions*” tulisan Alfred Diamant yang dimuat dalam jurnal *Public Administration Review* (PAR) pada tahun 1967. Caiden dalam Asropi (2008) menguraikan inovasi sebagai bagian dari reformasi administrasi (*administrative reform*).

Beberapa tulisan tersebut menandai mulai diperhatikannya inovasi oleh para pakar administrasi publik. Hanya saja, konsep inovasi kemudian masih belum cukup populer dalam ranah administrasi publik dan reformasi administrasi. Inovasi populer dalam bidang tersebut baru pada dekade terakhir. Fontana (2011:18) mengatakan bahwa Inovasi sebagai keberhasilan ekonomi berkat adanya pengenalan cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output (teknologi) yang menghasilkan perubahan besar atau drastis dalam perbandingan antara nilai guna yang dipersepsikan oleh konsumen atas manfaat suatu produk (barang dan atau jasa) dan harga yang ditetapkan oleh produsen. Lebih lanjut

dijelaskan bahwa, inovasi yang berhasil adalah inovasi yang menciptakan nilai lebih besar untuk konsumen, untuk komunitas dan lingkungan pada saat yang sama.

Inovasi merupakan konsep yang relatif baru dalam literatur administrasi publik (*Public administration*). Menurut Anatan & Ellitan (2009) inovasi merupakan suatu hal yang penting dalam mencapai keunggulan kompetitif. Tanpa inovasi, perusahaan akan mati. Perusahaan yang melakukan inovasi secara terus-menerus akan dapat mendominasi pasar, dengan kreasi, model dan penampilan produk yang baru. Pada akhirnya dengan strategi inovasi akan memunculkan keunikan produk yang sulit ditiru pesaing.

Terkait dengan Inovasi terdapat model teori yang ditawarkan untuk menganalisis permasalahan yang semakin kompleks serta mengukur tingkat keberhasilan inovasi untuk mewujudkan *Good Governance*. Perkembangan studi melahirkan beberapa pakar yang memperkenalkan tentang teori inovasi salah satunya Rogers (2003) dalam Yusuf (2019) yang melihat bahwa keberhasilan inovasi dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu : *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif), *Compability* (Kesesuaian), *Complexity* (Kerumitan), *Triability* (Kemungkinan dicoba), *Observability* (Kemudahan diamati). Berikut akan dijelaskan ke lima indikator tersebut:

1. *Relative Advantage* (Keuntungan relatif).

Sebuah inovasi lazimnya harus memiliki keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi pembeda dengan yang lainnya.

2. *Compability* (Kesesuaian).

Inovasi juga bersifat kompatibel yang berarti bahwa Inovasi yang terbaru memiliki kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta ditinggalkan begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian penting dalam proses transisi ke inovasi terbaru.

3. *Complexity* (Kerumitan).

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi tentunya menghadirkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

4. *Triability* (kemungkinan dicoba).

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama.

5. *Observability* (kemudahan diamati).

Sebuah inovasi harus juga diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang yang baik.

Teori Rogers diatas, digunakan sebagai unit analisis untuk melihat dan mengetahui kelebihan maupun kekurangan dari inovasi administrasi kepegawaian dalam mewujudkan *Good Governance* melalui sistem aplikasi pengelolaan informasi kepegawaian terintegrasi (E-Pinisi) di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan.

2. **Administrasi Kepegawaian**

Administrasi kepegawaian sangat erat kaitannya dengan pegawai atau karyawan. Didalam proses administrasi kepegawaian membahas atau mencatat segala sesuatu yang berhubungan

dengan pegawai. Menurut Slamet Saksiono (1995) “administrasi kepegawaian merupakan cabang ilmu administrasi yang paling menentukan bagi kehidupan suatu organisasi. Administrasi kepegawaian pada hakikatnya adalah manusia yang sekaligus juga objek atau tujuan kegiatan dari organisasi itu sendiri”.

Arifin Abdurachman dalam Moekijat (1991:2) mendefinisikan Administrasi Kepegawaian adalah “Administrasi Kepegawaian Negara (Public Personnel Administration) adalah salah satu cabang daripada Administrasi Negara yang bersangkutan dengan segala persoalan mengenai pegawai-pegawai negara” Berdasarkan penjelasan definisi Administrasi kepegawaian oleh ahli maka jelas bahwa administrasi kepegawaian adalah administrasi yang membahas tentang pegawai-pegawai negeri.

Pengertian administrasi kepegawaian menurut Widjaja (1986:16) dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Sebagai “ILMU”

Mempelajari segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentiannya.

b. Sebagai “PROSES”

Proses penyelenggaraan politik kepegawaian (kebijaksanaan politik kepegawaian = *personnel policy*) atau program kerja/ tujuan berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Sebagai “FUNGSI”

Mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan, yang meliputi kegiatan:

- Merumuskan tujuan, sasaran pokok kebijaksanaan politik dan,
- Menyusun organisasi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan sasaran pokok/kebijaksanaan politik itu.

d. Sebagai “SENI”

Seni memilih pegawai baru serta menggunakan pegawai-pegawai lama dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari segenap tenaga kerja manusia itu diperoleh hasil dan jasa yang maksimal baik mengenai jumlah maupun mutunya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi kepegawaian adalah segenap rangkaian aktivitas pegawai yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Konsep Good Governanve

a. Definisi *Good Governance*

Arti *Good Governance*, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Menurut Romli (2007:131) istilah *good governance* berasal dari induk bahasa Eropa Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *Govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan

utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan

Menurut Mardiasmo (2021:18) *good governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Menurut Sedarmayanti (2003:7) *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi yang langka, dan penghindaran korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

b. Prinsip-Prinsip Good Governance

Pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain. Termasuk prinsip dalam pemerintahan, maka berikut ini terdapat prinsip-prinsip untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang dikemukakan oleh Sukarno (2009:17), yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, dan (3) Partisipasi Masyarakat. Ketiga prinsip utama ini saling mempengaruhi dan mendukung pelaksanaan masing-masing berikut penjelasan prinsip tersebut :

- 1) Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
- 2) Transparansi : Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- 3) Partisipasi Masyarakat : semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak.

4. Aplikasi

Menurut Kamus Lengkap Dunia Komputer (Wahana Komputer, 2002), program adalah sekumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa kode skema atau bentuk lain yang bila digabungkan dengan media yang dapat dibaca komputer akan dapat membuat fungsi komputer untuk melakukan fungsi tertentu termasuk petunjuk desain penyetelan. proses menghasilkan output yang diinginkan oleh programmer. Program ini dapat digunakan berulang-ulang tanpa harus menulis ulang program "Program ini merupakan pembelajaran bahasa komputer yang tersusun secara logis dan sistematis, hal ini menurut sugiyono dalam (Rahman & Santoso, 2015)

Aplikasi merupakan suatu kelompok file (form, class, report) yang bertujuan untuk melakukan aktivitas tertentu yang saling terkait, di mana ruang lingkup dari suatu aplikasi berbeda – beda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya (Santoso, 2000:9).

Menurut Jogiyanto (2005:12) aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi output.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2020:52) adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi merupakan perangkat lunak untuk mengelola data tertentu yang saling terkait sehingga memberi kemudahan bagi pengguna untuk mengakses data yang telah diolah.

5. Pengelolaan Informasi Kepegawaian Terintegrasi (E-Pinisi)

a. Definisi E-Pinisi

E-Pinisi Merupakan sebuah aplikasi layanan informasi berbasis web yang terintegrasi dengan seluruh proses kepegawaian yang dikembangkan oleh BKD Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

b. Tujuan E-Pinisi

E-Pinisi bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan informasi kepegawaian yang terintegrasi, akurat, dan *real time* sehingga menjamin efisiensi, efektivitas akurasi dalam pengambilan keputusan.

c. Manfaat Untuk Pegawai

Sebagai media penyimpanan data, dengan adanya E-Pinisi, pegawai dapat menyimpan datanya untuk keperluan pengurusan berkas kepegawaian. Sehingga memudahkan pegawai dalam melakukan proses layanan kepegawaian, pencarian berkas, serta memonitoring data-datanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu memberikan gambaran, penjelasan yang tepat secara obyektif mengenai keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti melalui pengumpulan data dari informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data interaktif melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan pengujian kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menyajikan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumen pendukung yang terkait dengan Inovasi Aplikasi Pengelolaan Informasi Kepegawaian Terintegrasi (E-Pinisi) di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan.

Data hasil penelitian yang disajikan merupakan hasil wawancara dengan informan dan dokumentasi di lapangan, yang kemudian dibahas dalam fokus penelitian berdasarkan teori Karakteristik Inovasi (Roger, 2003), dengan variabel yang dibahas yaitu: *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif), *Compability* (Kesesuaian), *Compability* (Kerumitan), *Triability* (Kemungkinan dicoba), *Observability* (Kemudahan diamati). Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif)

Menurut Rogers dalam (Yuliana, 2018) keuntungan relatif yaitu sejauh mana suatu inovasi yang hendak diimplementasikan dianggap menguntungkan bagipenerima atau pengguna. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan diukur berdasarkan nilai ekonomis, kepuasan pengguna atau memiliki suatu komponen yang sangat penting. Percepatan implementasi akan semakin mudah dan cepat apabila inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya.

Keunggulan Relatif (*Relative Advantage*) yaitu menentukan apakah melaluiInovasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Informasi Kepegawaian Terintegrasi E-Pinisi ini dapat memberikan keuntungan bagi pegawai/ASN di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan dalam mewujudkan *Good Governance* yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan di Lingkup BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan dapat dikatakan bahwaberdasarkan keseluruhan

pernyataan informan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan indikator *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif) maka dapat disimpulkan bahwa Aplikasi E-Pinisi yang diimplementasikan di kalangan Pegawai/ASN dalam lingkup BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan sudah memilikimanfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh penggunanya.

2. **Compatibility (Kesesuaian)**

Teori kesesuaian yang dimaksud oleh Rogers dalam (Yuliana, 2018) menjelaskan tingkat kesesuaian antara suatu inovasi dengan nilai, pengalaman yangdahulu, dan kebutuhan-kebutuhan dari penerima dari suatu inovasi. Inovasi juga bersifat kompatibel yang berarti bahwa Inovasi yang terbaru memiliki kesesuaian dengan inovasi yang digantinya.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan mengenai pelaksanaan program inovasi sistem Aplikasi pengelolaan informasi kepegawaian terintegrasi E-Pinisi disimpulkan bahwa pengelolaan informasi kepegawaian yang terintegrasi berbasis Aplikasi yang digagas oleh pemerintah sebagai bagian dalam proses pelayanan administrasi kepegawaian kepada pegawai telah memenuhi nilai-nilai keterbukaan informasi dalam lingkup BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan, karena hal itu didukung oleh Aplikasi yang tujuannya mewujudkan pengelolaan informasi kepegawaian yang terintegrasi, akurat, dan *real time* dan memenuhi indikator kesesuaian .

3. **Complexity (Kerumitan)**

Kerumitan yang dimaksud dalam Teori Rogers dalam (Yuliana, 2018) ialah, tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang yang mudah dimengerti dan mudah dalam penggunaannya akancepat tersebar, dan sebaliknya inovasi yang sulit dimengerti dan sulit digunakan oleh penerima maka akan lambat dalam proses penyebarannya.

Kerumitan (*Complexity*) yaitu berkaitan dengan tingkat kesulitan dan kemudahan pengguna dalam memahami inovasi pengelolaan informasi kepegawaian yang terintegrasi berbasis Aplikasi E-Pinisi, apabila Inovasi Aplikasi E-Pinisi selama pelaksanaannya di kalangan pegawai/ASN dan dirasakan bahwa mudah dalam memahami Aplikasi dan mudah dalam penggunaannya maka Inovasi Aplikasi E-Pinisi penggunaan nya lebih cepat memahami cara menggunakan Aplikasi E-Pinisi ini.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa dari keseluruhan pernyataan informan yang telah diuraikan tersebut dapat dipahami bahwa Aplikasi E-Pinisi sulit untuk dipahami cara penggunaan aplikasinya bagi kalangan pegawai serta terdapat pegawai yang masih gagap dalam penggunaan teknologi.

4. **Triability (kemungkinan dicoba)**

Menurut Rogers dalam (Yuliana, 2018) Kemampuan untuk diujicobakan adalah sejauh mana suatu inovasi dapat dicoba atau tidak oleh penerima suatu inovasi. Sehingga suatu inovasi yang hendaknya ingin di implementasikan kepada pengguna harus mampu diujicoba dan mengemukakan keunggulannya.

Kaitan antara Kemampuan diujicobakan dengan Penelitian inovasi sistem pengelolaan informasi kepegawaian yang terintegrasi berbasis Aplikasi adalah untuk mengetahui apakah sebelum diluncurkan dan digunakan sebagai pengelolaan informasi kepegawaian, apakah Aplikasi E-Pinisi sebelumnya dapat diujicoba dan memiliki keunggulan sehingga dipilih sebagai pengelolaan informasi kepegawaian oleh BAPPELITBANGDA provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dapat dipahami bahwa inovasi pengelolaan informasi

kepegawaian yang terintegrasi melalui Aplikasi E-Pinisi telah diuji coba kan pada BKD provinsi Sulawesi Selatan dan diuji coba kan kembali pada saat sosialisasi kepada pegawai/ASN dalam lingkup BAPPELITBANGDA provinsi Sulawesi Selatan.

5. Observability (Kemudahan diamati)

Menurut Rogers dalam (Yuliana, 2018) kriteria kemampuan untuk diamati ini berkaitan dengan mudah atau tidaknya hasil penggunaan inovasi dapat diamati dengan mudah oleh masyarakat, semakin hasil dari suatu inovasi dilihat hasilnya maka akan semakin mempermudah suatu inovasi diterima dan di adopsi oleh masyarakat, sebaliknya apabila suatu inovasi sukar untuk disaksikan manfaat dari penggunaannya maka akan semakin lama prosesnya untuk diterima.

Sementara korelasi antara penelitian ini dengan indikator kemampuan diamati adalah untuk mengamati sejauh mana penggunaan Aplikasi E-Pinisi dikalangan pegawai/ASN di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat manfaat dari penggunaan Aplikasi tersebut oleh pegawai/ASN.

Berdasarkan temuan dilapangan diperoleh informasi bahwa selama berjalannya inovasi pengelolaan informasi kepegawaian yang terintegrasi berbasis Aplikasi E-Pinisi di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dikemukakan oleh informan dapat disimpulkan bahwa Implementasi program inovasi pengelolaan informasi kepegawaian yang terintegrasi berbasis Aplikasi E-Pinisi manfaatnya dapat dirasakan pada pegawai/ASN hal ini disebabkan kegunaan Aplikasi E-Pinisi sebagai pengelolaan informasi kepegawaian yang terintegrasi, akurat, dan *real time* secara digital yang memudahkan pegawai/ASN dalam menemukan dan mengelolah data kepegawaian di lingkup BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Penelitian Inovasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Informasi Kepegawaian Terintegrasi (E-Pinisi) di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat di tarik kesimpulan penerapan Aplikasi E-Pinisi ini telah memberikan inovasi dalam mewujudkan *Good Governance*. Secara umum inovasi sistem aplikasi pengelolaan informasi kepegawaian terintegrasi (E-Pinisi) di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik, hal ini dibuktikan berdasarkan 5 indikator karakteristik inovasi Roger (2003), yaitu:

- 1) *Relative Advantage* (Keuntungan Relatif)
- 2) *Compability* (Kesesuaian)
- 3) *Complexity* (Kerumitan)
- 4) *Triability* (Kemungkinan dicoba)
- 5) *Observability* (Kemudahan di Amati).

Perlu di optimalkan pada indikator *Complexity* (Kerumitan) yang masih belum baik.

2. Saran

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan diharapkan BAPPELITBANGDA Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa meningkatkan inovasi pada indikator *Complexity* (Kerumitan) dengan memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada pegawai/ASN

mengenai cara mengoperasikan Aplikasi E-Pinisi di BAPPELITBANGDA Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatan, L., & Ellitan, L. (2009). *Manajemen Inovasi (Transformasi Menuju Organisasi Kelas Dunia)*. Bandung: Alfabeta.
- Asropi, A. (2008). Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 5(3), 4.
- Azhari, M. F., & Manar, D. G. (2022). Penggunaan Aplikasi SI D'nok oleh Pemerintah Kota Semarang dalam Mewujudkan Good Governance. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 148–169.
- Fontana, A. (2011). *Innovative We Can: Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai Individu, Organisasi, dan Masyarakat*. Jakarta: Cipta Inovasi Sejahtera.
- Jogiyanto, H. M. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moekijat. (1991). *Manajemen Kepegawaian*. Bandung: Alumni.
- Poejadi, M. (2001). *Pelaksanaan Inovasi dalam Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Administrasi Kepegawaian*. Bandung: Tarsito.
- Pranita, N. S. (2015). *Inovasi Administrasi Kepegawaian dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam Mewujudkan Good Governance (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu)*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Budaya.
- Rahman, F., & Santoso, S. (2015). Aplikasi Pemesanan Undangan Online. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 1(2), 78–87.
- Republik Indonesia. (2003). *Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Romli, L. (2007). *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saksono, S. (1995). *Kinerja Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Santoso, H. (2000). *Membuat Multiaplikasi menggunakan Visual Basic 6*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Sedarmayanti, M. (2003). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, K. S. (2009). *Implementasi Prinsip "Good Governance" dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2009 di Kabupaten Karanganyar*. Universitas Sebelas Maret.
- Wahana Komputer. (2002). *Kamus Lengkap Dunia Komputer*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widjaja, A. W. (1986). *Administrasi Kepegawaian: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yusuf, S. Y. M. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government pada Kantor Pelayanan Bersama Samsat Mataram. *Media Bina Ilmiah*, 13(8),1433–1444.